

Urgensi Kritik Sosial Oleh Selebriti dalam Diskursus Publik Di Media Sosial X Mengenai Isu Sosial dan Politik

Masya Masrofah¹, Eni Maryani², Rachmaniar³

¹²³Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email: masya21001@mail.unpad.ac.id¹, eni.maryani@mail.unpad.ac.id²,
rachmaniar@mail.unpad.ac.id³

Abstract

Artikel ini membahas urgensi keterlibatan selebriti dalam diskursus publik di media sosial X terkait isu sosial dan politik, khususnya polemik Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Di era digital, selebriti tidak hanya berperan sebagai figur hiburan, tetapi juga sebagai aktor strategis yang mampu memengaruhi opini publik melalui modal simbolik berupa popularitas, kredibilitas, dan daya tarik emosional. Isu Revisi UU TNI yang sarat dengan implikasi demokratis, terutama terkait potensi kembalinya dwifungsi militer, memperlihatkan bagaimana suara selebriti dapat memperkuat advokasi publik dan membuka ruang dialog kritis di media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran dan signifikansi keterlibatan selebriti dalam memperluas diskursus publik serta bagaimana mereka memanfaatkan media sosial sebagai arena advokasi digital. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, yaitu menelaah literatur, artikel ilmiah, dokumen kebijakan, serta jejak digital berupa postingan selebriti, respons warganet, dan pemberitaan daring. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan isi (content analysis) untuk menemukan pola wacana dan konstruksi makna yang terbentuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selebriti berperan penting sebagai opinion leader yang dapat memobilisasi kesadaran publik, membentuk counterpublics sebagaimana dikemukakan Nancy Fraser, serta menjadi bagian dari gerakan sosial baru yang menekankan identitas, nilai, dan resistensi digital. Kritik sosial yang mereka suarakan tidak hanya merepresentasikan keresahan masyarakat, tetapi juga memperluas ruang demokrasi digital dengan menyeimbangkan narasi dominan negara. Dengan demikian, keterlibatan selebriti memiliki urgensi strategis dalam menjaga akuntabilitas kebijakan publik sekaligus mendorong partisipasi politik warga di era digital.

Keywords : *advokasi digital, opini publik, revisi UU TNI, ruang publik, selebriti*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) international license.

1. PENDAHULUAN

Di era digital, dinamika diskursus publik mengalami pergeseran yang signifikan. Media sosial, khususnya media sosial X (sebelumnya Twitter), telah menjadi ruang ekspresi baru di mana aktor non-negara, termasuk selebriti, berperan aktif dalam menyuarakan kritik sosial dan membentuk opini publik. Media sosial X memungkinkan percakapan berlangsung secara real time dan viral, menjadikannya medium strategis dalam membangun kesadaran publik terhadap isu-isu penting, termasuk isu kebijakan negara seperti Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Revisi UU TNI yang kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025 menuai kritik dari banyak kalangan. Salah satu poin krusial yang menuai penolakan adalah perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif, yang dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru. Di tengah ketegangan ini, peran selebriti menjadi signifikan. Dengan jumlah pengikut yang besar dan kepercayaan publik yang kuat, selebriti muncul sebagai aktor penting yang turut menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut di media sosial X.

Keterlibatan selebriti dalam isu publik tidak hanya mencerminkan opini personal, melainkan juga dapat dipahami sebagai bentuk advokasi yang memperluas ruang publik. Nancy Fraser (2012) menegaskan bahwa ruang publik tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari berbagai *subaltern counterpublics* atau ruang-ruang diskursif alternatif yang memberi kesempatan bagi kelompok atau komunitas yang termarginalkan untuk mengekspresikan kepentingan, identitas, dan kritiknya. Namun, Fraser juga mengingatkan bahwa akses terhadap ruang publik sering kali tidak setara; terdapat bias kelas, gender, dan struktur sosial yang membuat sebagian suara lebih mudah terdengar dibandingkan yang lain. Dalam konteks media sosial, ketidaksetaraan ini dapat tercermin dari siapa yang memiliki jumlah pengikut besar, akses teknologi, dan kredibilitas sosial untuk memengaruhi percakapan publik. Selebriti, dengan modal simbolik dan kulturalnya, mampu memanfaatkan keistimewaan tersebut untuk mengangkat wacana alternatif, menantang narasi dominan negara, serta mendorong pluralitas dalam diskursus demokratis (Hartini & Hanafi, 2021).

Selain itu, dalam kerangka New Social Movement Theory, keterlibatan selebriti juga mencerminkan transformasi perlawanan politik dari model tradisional yang berbasis kelas ke arah gerakan yang menekankan identitas, nilai, dan ekspresi budaya (Buechler, 2015). Aksi selebriti

dalam menolak Revisi UU TNI melalui media sosial merupakan bagian dari bentuk gerakan sosial baru yang memanfaatkan teknologi digital sebagai alat resistensi, di mana perjuangan tidak lagi hanya berlangsung di jalanan atau parlemen, tetapi juga di linimasa dan kolom komentar. Sejumlah penelitian terdahulu turut menegaskan relevansi keterlibatan selebriti dalam advokasi digital. Misalnya, Alifiarry & Kusumasari (2021) menemukan bahwa gerakan digital #TolakRUUPermusikan memperlihatkan bagaimana figur publik berperan sebagai aktor simbolik yang menyuarakan keresahan kolektif masyarakat melalui tagar dan aksi digital.

Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa selebriti memiliki kapasitas strategis dalam membangkitkan kesadaran politik masyarakat, terutama melalui interaksi langsung di media sosial. Lebih jauh, penelitian Prawira (2024) menyoroti strategi political influencer dalam memobilisasi partisipasi politik daring, seperti penggalangan petisi dan diskusi publik, yang memperdalam pemahaman isu politik di kalangan warganet. Senada dengan itu, Meilinda & Fransisca (2024) membuktikan bahwa influencer politik berpengaruh signifikan dalam membentuk pandangan dan aksi politik, khususnya di kalangan generasi muda pengguna aktif media sosial. Sementara itu, Kissas (2024) dalam konteks internasional menunjukkan bahwa advokasi selebriti di media sosial, khususnya Instagram, dapat dimaknai sebagai bentuk politik populis keseharian yang memberi ruang bagi narasi alternatif terhadap wacana dominan negara.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada isu advokasi digital secara umum maupun gerakan sosial berbasis tagar dan figur publik di media sosial. Artikel ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara khusus urgensi keterlibatan selebriti dalam diskursus publik mengenai isu sosial dan politik khususnya dalam penelitian ini adalah isu terkait Revisi UU TNI, sebuah isu politik nasional yang sarat dengan implikasi demokratis terkait relasi sipil-militer. Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka ruang publik Nancy Fraser untuk memahami peran selebriti sebagai bagian dari *counterpublics* yang menantang narasi dominan negara, serta teori gerakan sosial baru untuk menjelaskan bagaimana selebriti memanfaatkan ekspresi budaya, identitas, dan teknologi digital sebagai instrumen resistensi politik. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menambah bukti empiris mengenai peran selebriti dalam advokasi digital, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dalam melihat selebriti sebagai aktor strategis dalam memperluas demokrasi digital di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dan mengapa keterlibatan selebriti dalam diskursus publik di media sosial X menjadi penting dalam konteks advokasi Revisi UU TNI. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini menelusuri kontribusi selebriti sebagai opinion leader dalam membentuk opini publik, serta bagaimana mereka memanfaatkan media digital sebagai ruang ekspresi dan advokasi sosial-politik. Melalui analisis terhadap berbagai sumber pustaka, artikel ini berupaya menegaskan peran strategis selebriti dalam memperluas ruang demokrasi digital dan meningkatkan partisipasi warga dalam pengawasan kebijakan negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipahami sebagai kegiatan penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai bahan utama untuk menjawab permasalahan penelitian Sari & Asmendri (2022). Berbeda dengan penelitian lapangan yang berorientasi pada data empiris langsung, penelitian kepustakaan menitikberatkan pada analisis literatur yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan publikasi daring. Prosesnya meliputi pemilihan topik, eksplorasi informasi, pengumpulan literatur, hingga analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi gagasan, tema, dan konsep penting (Zed, 2008). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menafsirkan fenomena keterlibatan selebriti dalam diskursus publik berdasarkan kerangka konseptual dan penelitian terdahulu yang sudah ada.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi dipilih karena mampu merekam jejak digital berupa postingan kritik sosial selebriti di media sosial X (Twitter), tanggapan warganet, serta berbagai pemberitaan daring terkait isu Revisi UU TNI. Data dokumentasi ini diperlakukan sebagai teks yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah pola wacana, respon publik, dan bagaimana modal simbolik selebriti memengaruhi diskursus publik. Dengan kombinasi penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi, penelitian ini dapat mengintegrasikan analisis teoritis dengan bukti-bukti empirik yang terekam dalam ruang digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Keterlibatan Selebriti dalam Advokasi Isu Sosial dan Politik

Keterlibatan selebriti dalam advokasi isu-isu sosial dan politik saat ini menunjukkan pergeseran peran mereka dari sekadar figur hiburan menjadi aktor yang berpengaruh dalam membentuk opini publik. Dalam isu sosial politik yang utamanya pada penelitian ini adalah isu terkait revisi UU TNI, partisipasi selebriti memperlihatkan urgensi baru dalam praktik advokasi, di mana suara mereka mampu menjangkau masyarakat luas dan memicu diskusi kritis di ruang-ruang publik digital. Ketika akses terhadap wacana alternatif dalam media arus utama seringkali terbatas, keberanian selebriti dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara menjadi penting untuk memperkuat demokrasi partisipatif dan menjaga akuntabilitas kekuasaan.

3.1.1 Selebriti sebagai Aktor Sosial dengan Modal Simbolik

Selebriti memiliki modal simbolik berupa popularitas, kredibilitas, dan daya tarik emosional, yang mana faktor-faktor tersebut sangat berperan dalam memperkuat advokasi isu publik khususnya yang cukup krusial seperti revisi UU TNI. Fakta tersebut dibuktikan dengan hasil dari studi yang dilakukan oleh Putri et al. (2025) yang menunjukkan bahwa selebriti memiliki peran strategis dalam membangkitkan kesadaran politik di tengah masyarakat. Kehadiran media sosial turut memperkuat penyampaian pesan-pesan tersebut dan membuka ruang interaksi langsung dengan para pengikutnya. Kini, selebriti tidak lagi terbatas sebagai figur hiburan semata melainkan turut bertindak sebagai agen perubahan (Putri et al., 2025).



Gambar 1 Respon Warganet terhadap Kritik Sosial Selebriti
(Sumber: Akun X @pandji)

Sebagaimana tertera dalam salah satu komentar seperti gambar di atas yang ditemukan pada salah satu postingan kritik sosial selebriti Indonesia. Berkat modal simbolik yang dimiliki selebriti, kehadiran mereka dalam isu-isu krusial seperti revisi UU TNI pada media sosial juga dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap keresahan publik yang seringkali diabaikan dalam diskursus resmi. Dengan kata lain, selebriti merepresentasikan apa yang dirasakan oleh masyarakat biasa yang mungkin tidak memiliki keberanian, akses, ataupun pengaruh untuk menyuarakan pendapat. Maka dalam situasi seperti ini, kritik sosial yang disampaikan oleh selebriti di media sosial seringkali mendapat perhatian dan dukungan dari publik karena dianggap mewakili apa yang banyak orang rasakan.

Fakta tersebut dibuktikan dengan riset yang dilakukan oleh Alifiarry & Kusumasari (2021) mengenai gerakan digital #TolakRUUPermusikan secara langsung mendukung argumen bahwa publik figur berperan sebagai aktor simbolik yang menyuarakan keresahan kolektif masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap merugikan, yang dimaksudkan dalam penelitiannya adalah ruang ekspresi dan

kebebasan artistik. Dalam penelitian tersebut, tokoh-tokoh seperti Ananda Badudu, Danilla Riyadi, dan lainnya menjadi penggerak utama yang tidak hanya menyuarakan kritik secara personal, tetapi juga membentuk narasi publik yang kemudian memperoleh dukungan dari masyarakat luas melalui tagar, petisi, hingga aksi demonstrasi secara langsung.



Gambar 2 Engagement Postingan Kritik Sosial pada Akun Selebriti
(Sumber: Akun X @wordfangs, @pandji, @Dandhy_Laksono)

Dengan “*privilege*” yang dibalut dengan narasi penuh emosional dan relevan dengan realitas yang sedang dihadapi publik sehingga dianggap dapat mewakili, pesan-pesan kritik sosial terhadap isu revisi UU TNI yang diunggah oleh para selebriti berpotensi untuk membuka ruang dialog di antara masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep ruang publik menurut Fraser (2012), yang menekankan bahwa ruang publik tidak bersifat tunggal dan homogen, melainkan terdiri atas berbagai “*counterpublics*” atau ruang-ruang alternatif di mana kelompok-kelompok yang terpinggirkan dapat menyuarakan kepentingannya. Dalam konteks ini, selebriti beserta para pengikutnya di media sosial dapat dilihat sebagai bagian dari counterpublic yang menantang

wacana dominan negara, sekaligus membentuk diskursus publik alternatif yang lebih partisipatif, inklusif, dan horizontal.

3.1.2 Selebriti sebagai Aktor Sosial dalam Mendukung Kesadaran dan Aksi Politik

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 3.1.2 bahwa ruang publik yang akhir tercipta di media sosial menjadi alternatif di mana kelompok-kelompok terpinggirkan dapat menyuarakan kepentingan mereka. Dalam konteks advokasi terhadap isu sosial dan politik, peran selebriti tidak hanya berhenti pada penyampaian kritik, tetapi juga berpotensi mendorong tumbuhnya kesadaran dan partisipasi politik, khususnya di kalangan warga net. Melalui narasi yang terbuka dan emosional, selebriti dapat menghubungkan isu struktural dengan pengalaman sehari-hari masyarakat, sehingga mendorong audiens untuk terlibat lebih jauh dalam diskusi publik dan aksi digital yang mendukung nilai-nilai demokrasi.



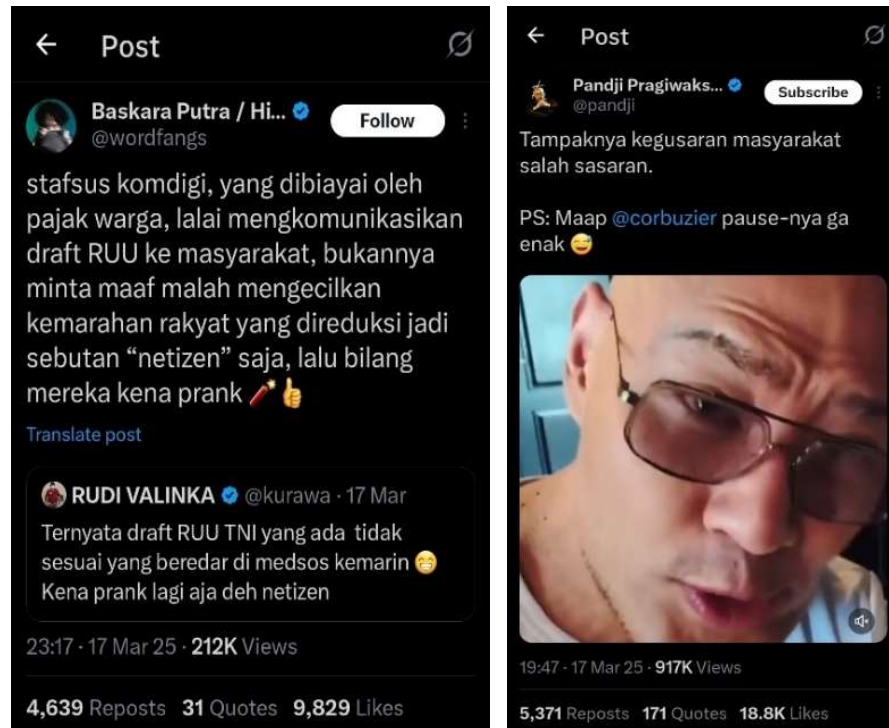
Gambar 3 Beragam Respon Warganet terhadap Kritik Sosial Selebriti
(Sumber: Akun X @wordfangs, @pandji, @Dandhy_Laksono)

Beragam komentar di atas merupakan bentuk respon terhadap kritik sosial dari beberapa selebriti Indonesia di media sosial X. Komentar-komentar tersebut terlihat menunjukkan kesadaran akan pentingnya isu ini hingga disertai ajakan untuk melakukan aksi nyata, didukung dengan hasil riset dari Prawira (2024) dalam

penelitiannya berjudul *“Political Influencers in Online Political Participation: Strategies and Challenges on Social Media Platforms”* mengatakan bahwa strategi yang digunakan selebriti politik pada media sosial diantaranya seperti penggalangan dukungan, petisi *online*, serta membuka diskusi berhasil memperdalam pemahaman politik, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Disamping itu, adapula penelitian dari Meilinda & Fransisca (2024) dengan metode kuantitatif terhadap 400 responden pengguna aktif media sosial yang mengikuti *influencer* dengan muatan politik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *influencer* memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pandangan politik, dan memobilisasi aksi politik di kalangan pengikutnya, terutama generasi muda. Temuan ini sejalan dengan pola keterlibatan tiga selebriti yang dianalisis dalam penelitian ini, di mana mereka turut mendorong kesadaran dan partisipasi publik melalui media sosial.

3..1.3 Peran Selebriti dalam Memperluas Ruang Publik Alternatif

Kehadiran selebriti dalam mengadvokasi isu-isu sosial politik yang dilakukan melalui media sosial juga dapat dipahami sebagai bentuk perluasan ruang publik alternatif. Ketika media arus utama tidak selalu menghadirkan keberagaman suara atau cenderung memuat narasi yang selaras dengan kepentingan negara, media sosial menjadi sarana yang lebih demokratis untuk menyuarakan keresahan kolektif masyarakat. Selebriti dan modal simbolik yang mereka miliki mampu memanfaatkan ruang ini untuk menyampaikan kritik sosial yang lebih komunikatif dan emosional, sehingga dapat menjangkau publik yang lebih luas. Mereka tidak hanya menyampaikan pendapat pribadi, tetapi turut membentuk wacana kritis yang seringkali tidak beredar dalam pemberitaan media konvensional.



Gambar 4 Postingan Kritik Sosial Selebriti
(Sumber: AKun X @wordfangs, @pandji)

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahkan kritik sosial yang disuarakan oleh para selebriti mampu berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan narasi terhadap informasi pemerintah yang dominan. Fakta tersebut sejalan dengan riset berjudul *"Populist Everyday Politics in the (Mediatized) Age of Social Media: The Case of Instagram Celebrity Advocacy"* yang dilakukan oleh Kissas (2024). Penelitian tersebut menemukan bahwa advokasi selebriti di media sosial dapat dipahami sebagai bentuk politik populis keseharian yang memosisikan selebriti sebagai figur "orang biasa" yang menyuarakan keresahan publik atas ketidakadilan sosial.

Melalui performa emosional dan moral media sosial yang dalam riset ini adalah Instagram, selebriti membangun narasi alternatif yang mampu menandingi atau menyeimbangkan narasi dominan dari pemerintah atau institusi resmi,

terutama ketika narasi negara dianggap tidak responsif terhadap penderitaan rakyat. Namun di sisi lain, Kissas (2024) menjelaskan bahwa narasi selebriti umumnya bersifat moderat dan tidak secara langsung menentang negara, melainkan lebih diarahkan untuk menyoroti ketimpangan, kegagalan kebijakan, atau sikap apatis elit politik.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan selebriti dalam diskursus publik mengenai isu sosial dan politik, khususnya terkait Revisi UU TNI, memiliki urgensi yang signifikan dalam memperkuat demokrasi digital. Selebriti, dengan modal simbolik berupa popularitas, kredibilitas, serta daya tarik emosional, mampu memobilisasi kesadaran publik dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas di media sosial. Kehadiran mereka tidak hanya merepresentasikan keresahan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai aktor strategis yang dapat menyeimbangkan narasi dominan dari negara maupun media arus utama.

Melalui media sosial, selebriti menjadi bagian dari ruang publik alternatif sebagaimana dikemukakan oleh Fraser (2012), di mana kritik sosial yang mereka suarkan berfungsi sebagai counterpublic yang menantang wacana resmi serta memberi ruang bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Selain itu, dalam kerangka *New Social Movement Theory*, keterlibatan selebriti dapat dipahami sebagai bentuk transformasi gerakan sosial baru yang mengutamakan ekspresi identitas, nilai, dan resistensi digital dibandingkan sekadar mobilisasi konvensional.

Dengan demikian, peran selebriti dalam advokasi isu Revisi UU TNI memperlihatkan pentingnya aktor non-negara dalam memperluas diskursus demokratis, meningkatkan partisipasi politik warga, serta menjaga akuntabilitas kebijakan publik. Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai efektivitas jangka panjang advokasi digital oleh selebriti, termasuk dampaknya terhadap perubahan kebijakan maupun dinamika gerakan sosial di Indonesia.

REFERENSI

- Alifiarry, M. A., & Kusumasari, B. (2021). The Application of Social Movement as a Form of Digital Advocacy: Case of #TolakRUUPermusikan. *Journal of Government and Civil Society*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i1.2991>
- Buechler, S. M. (2015). New Social Movement Theory. *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosn022.pub2>
- Fraser, N. (2012). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy'. *Duke University Press*.
- Hartini, S., & Hanafi, A. N. (2021). Pengaruh Kredibilitas dan Karakteristik Opinion Leader terhadap Behavioral Intention Konsumen pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 211. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.704>
- Kissas, A. (2024). Populist everyday politics in the (mediatized) age of social media: The case of Instagram celebrity advocacy. *New Media and Society*, 26(5), 2766–2785. <https://doi.org/10.1177/14614448221092006>
- Meilinda, V., & Fransisca, V. (2024). Influencer Culture and Public Opinion: A Study on the Impact of Digital Influencers on Political Mobilization. *Islamic Journal of Communication and Public Discourse*, 1, 40–46. <https://ijcpd.staiku.ac.id/index.php/st/index>
- Prawira, Y. (2024). PENGARUH POLITICAL INFLUENCER TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DARING DI X (Studi Eksplanatori Pengaruh Political Influencer Terhadap Partisipasi Politik Daring Melalui Mediasi Efikasi Politik di Akun X @JimlyAs) POLITICAL INFLUENCER EFFECT ON ONLINE POLITICAL PARTICIPATION IN X (An Explanatory Study of Political Influencers Effect on Online Political Participation Through Mediation of Political Efficacy in @JimlyAs).
- Putri, L. A., Halim, M. D. A., Daffa, M. S., Megantara, A. A., Nurjaman, S. M., Rahmadani, E., & Supriyono. (2025). Konstruksi Sosial Selebriti di Dunia Politik: Implikasi Pendidikan dan Pengaruh Media. *Jurnal Cakrawala Pendidikan Dan Biologi*, 2, 8–20. <https://doi.org/10.61132/jucapenbi.v2i1.135>
- Sari, M., & Asmendri. (2022). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 41–53.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jaya.